

Pelaksanaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki)

Sri Nur Aini¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl Kaharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
srinuraini@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : November 13, 2025;

Abstract

The Family Child Development Program is designed to equip mothers with knowledge and skills on how to raise and care for children. So that the children can grow and develop well. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Family Resilience and Welfare Program by the Population Control and Family Planning Service of Pekanbaru City has not been fully running well. This is reflected in the low level of community participation, especially in Payung Sekaki District. The following are the inhibiting factors for the implementation of the Family Adaptation and Welfare Program by the Population and Family Planning Control Service (Payung Sekaki Sub-district Study) in Pekanbaru. The quality of integrated health post services and community participation are not passive, but the active role of the community, especially mothers with children under five years old, is still lacking.

Keywords: *Implementation, Family Resilience and Welfare Program*

Abstrak

Program Pengembangan Keluarga Anak dirancang untuk membekali para ibu dengan pengetahuan dan keterampilan tentang cara membesarkan dan merawat anak. Agar anak-anak tersebut dapat tumbuh Kembang dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki. Berikut faktor penghambat pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan Payung Sekaki) di Pekanbaru. Kualitas pelayanan posyandu dan partisipasi masyarakat tidak bersifat pasif, namun peran aktif masyarakat khususnya ibu yang mempunyai anak dibawah lima tahun masih kurang.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Melaksanakan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang termasuk

dalam Pembukaan UUD 1945. Semangat, arah dan gerak pembangunan secara keseluruhan adalah melaksanakan seluruh sila dalam Pancasila secara serasi dan terpadu

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi landasan pelaksanaan program pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Penciptaan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa “Keluarga berencana bertujuan untuk menaikkan usia perkawinan, mengatur kelahiran, menjamin stabilitas keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menciptakan keluarga kecil melalui kesadaran masyarakat, adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi, keluarga bahagia dan sejahtera.”

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka organisasi perangkat daerah, khususnya organisasi yang membidangi permasalahan terkait program Keluarga Berencana Nasional/BKKBN, menjamin keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga merupakan tugas wajib negara, seperti kesehatan, sektor, perencanaan dan pengendalian pembangunan telah menjadi satu, layanan kependudukan dan masalah lain yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam peraturan Pemerintah Indonesia ditegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, provinsi, atau kota bertanggung jawab menyelenggarakan program keluarga berencana.

Desa KB merupakan bagian dari pembangunan negara dan merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Desa KB adalah suatu kesatuan wilayah dengan kriteria tertentu yang mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor terkait secara sistematis. Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu percontohan yang dipilih Presiden untuk dijadikan percontohan bagi desa dan dusun/kecamatan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera.

Di desa KB dilaksanakan delapan fungsi keluarga, dan pendekatan program KB dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 “Tentang Perkembangan Kependudukan, Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga”.

Terkait pembentukan kampung KB di BKBNN Pusat mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan dan Pembentukan Kampung KB Seluruh Indonesia. Kepala BKBNN Pusat no. 046/BL/200/B4/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Siaran Langsung Pencanangan dan Pembentukan Perkampungan Keluarga Berencana di Seluruh Indonesia.

Kampung Kenanga KB di Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki didirikan pada tanggal 22 Agustus 2017. Desa Tampan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Payung Sekaki dengan Desa KB Kenanga yang terletak di Kecamatan Payung Sekaki Kantor Pusat Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki. Berikut program yang dilaksanakan di Desa KB Kenanga Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

1. Tunjangan keluarga anak (BKB)

Kelompok Bina Keluarga Anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, sasaran program pada kelompok ini adalah keluarga yang memiliki anak.

2. Pembinaan Keluarga Remaja (BKR)

Kelompok Pembinaan Keluarga Remaja berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang tua anak remaja. Dan melalui kelompok ini merupakan metode komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja untuk kesehatan fisik, mental, intelektual, reproduksi, emosional, sosial, moral dan spiritual.

3. Pembinaan Keluarga Lanjut Usia (BKL)

Kelompok Pengembangan Keluarga Senior bertujuan untuk mendukung para lansia dan keluarga mereka. Kelompok ini akan menyelenggarakan serangkaian acara untuk membekali para lansia dan keluarga dengan pemahaman dan keterampilan dalam mendukung, membina, merawat, dan memberdayakan para lansia agar dapat menjalani kehidupan yang mandiri, produktif, produktif, dan sejahtera hidup mereka.

4. Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPCS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan mengembangkan usaha yang menguntungkan sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

5. Pusat Informasi Nasehat Remaja (PIK-R)

Pembinaan keluarga remaja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi keluarga yang mempunyai anak remaja, dan Pusat Informasi dan Konseling yang disingkat PIK Remaja merupakan wadah kegiatan dari program PKBR (Persiapan Kehidupan Keluarga Remaja).

Penelitian ini fokus pada satu program saja, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB). Program Pengembangan Keluarga Anak adalah program yang dirancang untuk membekali para ibu dengan pengetahuan dan keterampilan tentang cara membesarkan dan merawat anak agar anak tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik. Program Bina Keluarga Anak Usia Dini dijalankan oleh staf atau pelatih lokal. Peran staf BKB adalah melakukan konseling, memantau perkembangan, memberikan layanan, dan mendorong rujukan anak yang mengalami masalah perkembangan kepada orang tua. Untuk melaksanakan pembentukan semua program ini maka dalam Renja Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru tahun 2023 untuk anggaran yang tersedia sebesar Rp. 120.000.000,- sementara untuk pengadaan sarana bagi semua program tersedia dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan biaya operasional bagi pengelola semua program tersedia anggaran sebanyak Rp. 4.102.832.091,-. Secara keseluruhan jumlah program pada setiap kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah Program disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Program				
		BKB	BKL	BKR	PIK-R	UPPKS
1.	Payung Sekaki	7	4	3	3	1
2.	Bukit Raya	17	6	4	8	2
3.	Marpoyan Damai	7	7	7	6	2
4.	Tenayan Raya	10	5	3	6	2
5.	Limapuluh	6	2	3	6	1
6.	Sail	3	1	1	6	1
7.	Pekanbaru Kota	3	6	2	3	1
8.	Sukajadi	7	2	4	5	2
9.	Senapelan	5	3	2	6	1

10.	Rumbai	8	7	3	2	1
11.	Binawidya	5	4	4	3	1
12.	Kulim	5	2	3	1	2
13.	Rumbai Timur	5	5	4	2	1
14.	Rumbai Barat	6	2	1	1	1
15.	Tuah Madani	8	6	5	6	2
Jumlah		102	62	49	64	21

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Tabel 1.2

Jumlah Kader dan Keluarga Anggota Program Bina Keluarga Balita di Kecamatan Payung Sekaki

Kode	Kelurahan	Jumlah Kader BKB	Jumlah Keluarga	
			Sasaran BKB	Anggota BKB
1001	Tampan	10	317	26
1002	Labuh Baru Timur	8	997	26
1003	Labuh Baru Barat	9	802	5
1004	Air Hitam	9	203	13
1005	Bandar Raya	10	488	12
1007	Tirta Siak	10	580	6
Jumlah Total		56	3387	88

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Dari hasil observasi peneliti menemukan beberapa fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan keluarga pada anak usia dini khususnya di kecamatan Payung Sekaki.

1. Terbatasnya kegiatan orientasi atau pelatihan teknis bagi praktisi keluarga berkembang atau staf untuk anak kecil.
2. Kurangnya promosi, kegiatan kelompok dan kegiatan sosialisasi kesejahteraan keluarga pada bayi, mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan BKB, kegiatan Posyandu dan banyaknya pertemuan/konseling perkembangan anak dan tidak adanya kegiatan masyarakat dan ibu. dan pengembangan.
3. Rendahnya koordinasi dan pemanfaatan mitra kerja dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan stabilitas keluarga dan melaksanakan program kesejahteraan anak balita.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi merupakan salah satu alat/inovasi untuk melaksanakan pembangunan. Sebab tanpa pengelolaan yang baik maka proses pembangunan tidak akan lancar.

Menurut Siagian (2018:2), manajemen adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Definisi di atas mengandung beberapa hal. Pertama, manajemen sebagai suatu seni adalah suatu proses dengan awal yang diketahui dan akhir yang tidak diketahui. Kedua, manajemen mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti kehadiran dua orang atau lebih, adanya tujuan yang ingin dicapai, tugas atau tugas yang harus dilaksanakan, dan tersedianya alat dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut Atmosudirjo (Zulkifli, 2005: 17), administrasi adalah serangkaian kegiatan yang membimbing dan mengarahkan organisasi modern serta bertindak sebagai alat bagi organisasi tersebut.

Menurut Rexohadipraviro, administrasi (Vijaja, 2012:37) adalah manajemen yang mencakup setiap penetapan dan penyusunan fakta secara tertulis dan sistematis guna memperoleh keterkaitan secara menyeluruh antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Jika mengacu pada perspektif jasa sebagai produk organisasi, maka konsep manajemen diartikan sebagai kegiatan menciptakan sekumpulan informasi tertulis yang dibutuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Diantara permasalahan pokok yang disebutkan oleh Pasolong (2012: 2): Siapa yang harus mengabdikan dan dilayani, serta siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini subyek yang dilayani masyarakat juga merupakan obyek yang dilayani masyarakat. Manusia harus menjaga ketertiban kehidupan sosialnya, dan manusia sendirilah yang harus menyelesaikan segala persoalan kehidupan sosialnya.

Menurut Waldo Syafie (2016:33) dalam pengertian administrasi publik : Administrasi publik adalah pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Menurut definisi di atas, administrasi publik merupakan gabungan manajemen dan lembaga yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan negara.

Siagian (2018:7) mengartikan pengertian administrasi publik sebagai berikut: Administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pejabat publik suatu negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan motivasi untuk memotivasi orang dan diri sendiri sangat diperlukan untuk melaksanakan dan menggerakkan organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Konsep Organisasi Publik

Menurut Siagian (2018:6), organisasi adalah segala bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang terhubung secara formal untuk mencapai tujuan bersama, dengan satu orang atau lebih sebagai pimpinan. atau sekelompok orang yang disebut penguasa.

Dari definisi di atas, organisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

A. Organisasi adalah forum tindakan administratif.

B. Organisasi adalah hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam hubungan formal.

Gibson dll. Al (2012:6) mengartikan "organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu".

Menurut Robbin (2018:4), "organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang terorganisir secara sadar dengan batasan-batasan yang relatif jelas dan beroperasi secara relatif terus menerus untuk mencapai tujuannya."

Menurut Weber (dalam Thoha, 2014:98): Organisasi dan kelompok koperasi mengandung unsur kekayaan sebagai berikut.

1. Organisasi adalah suatu sistem hubungan sosial, dalam hal ini individu-individu melakukan proses komunikasi satu sama lain dalam organisasi.
2. Adanya batasan (boundaries) tertentu dalam organisasi, sehingga seseorang tidak secara sukarela melakukan proses komunikasi dengan orang lain. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. Organisasi adalah kumpulan peraturan yang dapat membedakan dan mengatur proses interaksi antara orang-orang yang bekerja di dalamnya agar interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. Organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang mencakup wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk melaksanakan fungsi tertentu.

Istilah lain untuk elemen ini adalah hierarki. Konsekuensi dari hierarki ini adalah dalam suatu organisasi terdapat pemimpin atau atasan dan bawahan atau karyawan. Menurut Etziomi (Thoha, 2014:100), "konsep organisasi dikemukakan sebagai sekelompok orang yang sengaja diorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu".

3. Konsep Manajemen Publik

Menurut Siagian (2018:5), manajemen dapat diartikan dalam dua hal: proses pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, dan kemampuan serta keterampilan orang-orang dalam jabatan manajerial untuk mencapai hasil kerja. kondisi mencapai suatu tujuan melalui tindakan orang lain. Oleh karena itu dapat dikatakan manajemen merupakan inti dari manajemen karena manajemen merupakan alat utama dalam manajemen.

Menurut Hyman (Manullang, 2014:1), manajemen adalah fungsi pengendalian upaya individu untuk mencapai kegiatan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Dalam menggerakkan organisasi, pemimpin harus menjalankan fungsi manajemen yang baik dan menurut Terry dan Ryu (2012:9):

- A. perencanaan (perencanaan)
- B. Organisasi (organisasi)
- C. Karyawan (karyawan)
- D. Untuk menginspirasi
- D. Kontrol (kontrol)

Sedangkan menurut Gie (Zulkilfli, 2005:28), fungsi manajemen adalah sebagai berikut.

- A. Perencanaan
- B. Pembuat keputusan
- C. Informasi singkat
- D. Pengorganisasian
- D. Peningkatan

Menurut Salam (2012:176), administrasi publik adalah usaha lembaga-lembaga publik untuk mengatur negara guna mencapai ketertiban, kesejahteraan dan kesejahteraan.

Pemerintahan daerah Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang memberikan otonomi luas, efektif dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dengan resolusi Republik Kazakhstan No

Menurut Sokarno (2012:70), kegiatan pengelolaan dapat dibagi menjadi beberapa komponen, antara lain:

- A. Perencanaan adalah tindakan mengumpulkan data dan informasi beserta pemikiran-pemikiran yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai dan di mana mencapainya. Semua ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak peduli siapa pun yang harus dijalankan.
- B. Pengorganisasian merupakan kelanjutan menyongsong terlaksananya rencana yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.
- C. Koordinasi, termasuk hubungan yang berkelanjutan dan kolaboratif berbagai jenis kegiatan harus dilakukan dengan lancar.
- D. Pengendalian adalah pengarahan seluruh kegiatan dan upaya agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- E. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin bahwa segala sesuatu yang direncanakan, diputuskan, atau diperintahkan dilaksanakan sesuai dengan keputusan tersebut.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, implementasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih mementingkan aspek abstrak dari proses manajemen, sedangkan fungsi eksekutif lebih mementingkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Konsep Pemerintahan Daerah

Penafsiran Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjadi dasar pembahasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus menerapkan demokrasi Pancasila di daerah dan pelosok tanah air. Selain itu, pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian pembangunan nasional, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2013. 5 Tahun 1974. Ini merupakan tanggung jawab besar yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

Pemerintahan daerah diatur dengan Keputusan Nomor 01 Tahun 2008/2012. 5 Pemerintahan Daerah Tahun 1974 adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan suatu sistem hubungan pemerintahan yang dibentuk atau diciptakan dengan menggunakan teknik desentralisasi, sering juga disebut dengan asas desentralisasi. Menurut Pasal 1 huruf b UU No. 5 Mei 1974 Desentralisasi mengacu pada pengalihan pekerjaan pemerintahan dari pemerintah atau daerah yang lebih tinggi ke daerah dan menjadikannya pekerjaan rumah tangga mereka sendiri. Sementara itu, dalam rangka otonomi daerah, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan bantuan perangkat daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. prinsip penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan Pemerintahan Nasional. Adapun otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

Pasal 1, Pasal 6 UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan warga negara daerah dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terciptalah ruang pemerintahan mandiri. Daerah Otonom untuk Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat

dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 23 Ayat 1 Ayat 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Konsep Pelaksanaan

Abdullah Sukur (2000:41) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program:

A. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksananya. Hal ini tergantung pada proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

B. Dalam hal ini sumber daya (resources) mencakup empat komponen: jumlah personel yang cukup, kualitas, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan tanggung jawab atas pelaksanaannya.

C. Sikap, sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program, khususnya oleh pelaksana program dan pelaksana program;

D. Struktur birokrasi seperti SOP (Standard Operating Procedures) yang mengatur alur pelaksanaan program. Kalau tidak sulit mencapai hasil yang memuaskan, karena solusinya unik tanpa model standar.

6. Konsep Program

Abadi Jones (2009:11) mengatakan bahwa program adalah suatu arah dan kegiatan tertentu yang didalamnya terdapat cara, kebijakan, prosedur, tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber daya yang digunakan dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disetujui. Program ini biasanya dijelaskan dengan sebaik-baiknya, dan tanpa implementasi maka tujuan dan sasaran yang diinginkan tidak dapat tercapai.

Metode

menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan obyektif realitas dan karakteristik suatu populasi tertentu (Trianto, 2010: 164). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alami yang menggambarkan permasalahan sosial manusia dari perspektif perilaku. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis dan kemudian melaporkan temuan penelitiannya.

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan informan tentang Pelaksanaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki)

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara Sosialisasi program gizi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru memerlukan komunikasi seperti yang dijelaskan di atas. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya secara penuh dengan bekerja sama dengan Puskesmas agar program ini dapat terlaksana secara optimal. Sementara itu, belum semua masyarakat mengetahui tentang program kesehatan ini karena masyarakat yang mengikuti program tersebut belum termotivasi sepenuhnya.

Berdasarkan hasil observasi, untuk memantau status gizi anak kecil sebelum menjadi gizi buruk, dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi gizi anak kecil kemudian mendeteksi gizi bayi yang terkena gizi buruk. kegiatan terkoordinasi terkait malnutrisi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru sebagai lembaga utama pelaksanaan Program Gizi Penduduk Pekanbaru terus melakukan pembinaan tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya gizi ibu dan bayi sejak lahir. Tahapan tumbuh kembang anak, oleh karena itu perlu adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan semua itu.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara Sumber daya yang tersedia berupa tenaga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru, namun pelaksanaan program kesehatan tersebut diyakini lebih rendah dibandingkan sebelumnya karena kurangnya tenaga dan tenaga, khususnya di Puskesmas dan tenaga kesehatan. Rasional Anggaran dan bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kesehatan ini telah sesuai dengan ketentuan tertentu, sehingga apabila masyarakat merasa kurang maka jumlah tersebut akan ditambah di kemudian hari. Walaupun staf dan personel Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru mempunyai pemahaman, pengetahuan dan sikap yang baik tentang pelaksanaan program perbaikan gizi, namun masih terdapat masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan program kesehatan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil Observasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah menyiapkan langkah-langkah peningkatan gizi pemerintah khususnya bayi dan anak kecil untuk memperlancar pelaksanaan Program Peningkatan Gizi Kota Pekanbaru. Untuk setiap kegiatan yang masuk dalam program, terdapat beberapa kegiatan non-anggaran yang dianggarkan namun diprioritaskan sebagai kegiatan kritikal yang dianggap berkinerja buruk. Langkah-langkah tersebut diyakini dapat menurunkan angka kejadian gizi buruk di Pekanbaru, namun bukan berarti tidak ada kegiatan tanpa anggaran. Kegiatan yang tidak dianggarkan rencananya akan diintegrasikan dengan kegiatan lainnya. Selain itu, anggarannya tidak hanya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru saja, melainkan dari APBN Pemerintah Pusat.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penetapan tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, tiap pegawai sudah mengetahui dan mengerti dengan tugas dan perannya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan telah tersusunnya struktur organisasi yang mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil observasi peran kader sangat penting karena kader merupakan orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mendapatkan pelatihan kesehatan dan nantinya kembali akan menyebar luaskannya di masyarakat pula. Namun dilain hal ternyata untuk peran kader dan keberadaan posyandu di masyarakat Kota Pekanbaru ini, belum semuanya dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru membentuk tim di bawah perintah Walikota Pekanbaru. Departemen

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mampu memantau dan menangani kasus-kasus gizi buruk. Namun tim ini tidak bisa bekerja sendiri, melainkan melibatkan koordinasi antar program dan sektor yang mungkin terkait dengan gizi buruk. Secara khusus, penempatan staf di pusat-pusat kesehatan masyarakat dan pusat-pusat kesehatan yang dekat dengan masyarakat seringkali diatur.

Namun belum semua daerah di Pekanbaru telah melaksanakan program tersebut dengan baik, bahkan di beberapa daerah, petugas sudah tidak aktif lagi atau kegiatan di posyandu kurang memadai. Hal ini dibuktikan dengan pendataan melalui puskesmas di Pekanbaru yang dianggap Posyandu tidak aktif dalam operasionalnya.

C. Faktor- faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki)

1. Anggaran

Pemerintah telah menganggarkan langkah-langkah program gizi masyarakat dalam APBD Pekanbaru tahun 2022, namun dalam APBDP Pekanbaru tahun 2022, seluruh kegiatan program gizi tidak dianggarkan karena adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi anggaran.

2. Kualitas pelayanan posyandu

Ada beberapa wilayah di kota pekanbaru ini yang posyandunya tidak berjalan padahal melalui kegiatan posyandu ini banyak manfaat dan kegiatan dapat berjalan untuk dapat mengatasi gizi buruk di Kota Pekanbaru.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam seluruh program dan kegiatan yang direncanakan, karena tanpa partisipasi masyarakat dan partisipasi aktif maka kegiatan yang direncanakan tidak akan berjalan dengan baik dan kemudian akan menghambat pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan interpretasi hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan Program Stabilitas dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan Payung Sekaki) Kota Pekanbaru sesuai dengan masalah penelitian bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan Payung Sekaki) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki, terbatasnya kegiatan orientasi dan pelatihan teknis bagi staf dan pelaksana kegiatan pengembangan keluarga anak usia dini, kurangnya promosi dan sosialisasi kelompok aksi. Tidak aktifnya masyarakat dan ibu-ibu dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan Posyandu dan pertemuan/konseling tumbuh kembang anak.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki) adalah sebagai berikut.

- a. Karena penataan anggaran yang optimal di APBD, maka tidak semua kegiatan yang termasuk dalam program perbaikan gizi mempunyai anggaran.
- b. Kualitas pelayanan posyandu tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa petugas di wilayah tersebut belum dapat melakukan setiap kegiatan di posyandu dengan baik, sehingga masih terdapat beberapa wilayah di Pekanbaru yang kualitas pelayanannya masih rendah.
- c. Partisipasi masyarakat, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun (balita), seperti mengikuti kegiatan rutin pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Abdullah, Syukufri. M. 2000. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga. Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Gie The Liang, 2000, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- Hamidi Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, *“Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada

- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Supriatna, Tjahya, 1996, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*" Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

b. Regulasi:

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sri Nur Aini¹ dan Lilis Suriani²

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025

514

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Bab I ayat 11.1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2014. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1994.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.

Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.

Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan

- Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). *Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir*. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 122-134.

- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan

- Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezeki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".